

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris pada Semua Sektor yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2015–2017)**

RINGKASAN SKRIPSI



Disusun Oleh:

**MARIA MARISTELA INDRIANI SALO
11-15-27780**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN YOGYAKARTA
2019**

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

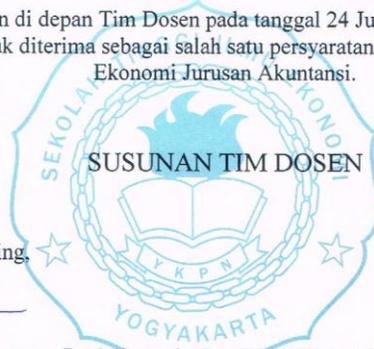
(Studi Empiris pada Semua Sektor yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2015-2017)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MARIA MARISTELA INDRIANI SALO

No Mahasiswa: 111527780

telah dipresentasikan di depan Tim Dosen pada tanggal 24 Juli 2019 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Akuntansi.



Pembimbing,

Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr.,MSA.,Ak.,CA. Wing Wahyu Winarno, Dr.,MAFIS, Ak.,CA.

Penguji,

Yogyakarta, 24 Juli 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Ketua,



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Semua Sektor yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2015-2017)

Maria Maristela Indriani Salo

STIE YKPN Yogyakarta

indrvsalo@gmail.com

ABSTRACT

This research was aimed at knowing the effects of corporate governance towards tax avoidance. Corporate governance measured by the proportion of independent commissioners (INDP), frequency of audit committee meetings (FREQ), and audit quality (KAP), while tax avoidance measured by cash effective tax ratio (CETR). This research used data from all sectors that listed on the Indonesia Stock Exchange at 2015-2017. The method in this research was done by using Structural Equation Modelling (SEM), with Partial Least Square as the analysis tools, and WarpPLS 6.0 as the application. The result of this research indicate corporate governance which measured by proportion of independent commissioners and frequency of audit committee meetings was proven have a negative effect towards tax avoidance, whereas corporate governance which measured by audit quality, do not have an effect towards tax avoidance.

Keywords: corporate governance, tax avoidance, independent commissioners, audit committee, audit quality

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. Pendahuluan

Pajak merupakan sektor potensial karena menjadi penyumbang penerimaan negara yang terbesar. Hal tersebut dapat dilihat dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam situsnya. Untuk diketahui, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa, penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2018 mencapai 1.521,4 triliun dari total pendapatan negara sebesar 1.942,3 triliun (Friana, 2019).

Berbeda dengan pemerintah, pajak dianggap oleh perusahaan sebagai penghambat dalam memaksimalkan laba. Menurut Suandy (2016), kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengklasifikasikan kas yang dibayar untuk pajak menjadi suatu beban, sehingga beban tersebut harus dikurangi agar dapat meningkatkan laba. Dipandang sebagai beban, membuat perusahaan berupaya untuk membayar pajak seminimal mungkin, dan hal itu tentunya berbenturan dengan yang diinginkan oleh fiskus. Fiskus membuat banyak regulasi yang membuat perusahaan terhambat untuk mengoptimalkan laba perusahaannya. Langkah yang diambil fiskus dilakukan dengan tujuan agar dapat memaksimalkan penerimaan negara di sektor pajak tiap tahunnya. Benturan kepentingan antara fiskus dan perusahaan yang seperti ini, pada akhirnya memicu perusahaan melakukan salah satu cara dalam manajemen pajak yakni praktik *tax avoidance*.

Tax avoidance menjadi langkah yang diambil oleh banyak perusahaan untuk meminimalkan pajak. Praktik *tax avoidance* ini merupakan suatu kegiatan yang legal,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yakni perusahaan melakukan pengefisienan terkait besarnya pembayaran pajak, menggunakan tindakan yang tidak menyalahi aturan perpajakan.

Tax avoidance menarik untuk diteliti karena ada beberapa alasan, salah satunya, yakni karena *tax ratio* Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih berada di bawah *threshold tax ratio* yang dibuat oleh *World Bank* yaitu 15%. Tingkat *tax ratio* yang masih rendah ini menunjukkan, banyak wajib pajak yang enggan melakukan pembayaran pajak sesuai jumlah yang seharusnya (Rasio Pajak (Tax Ratio) dari Masa ke Masa, 2018).

Berdasarkan data yang dimiliki oleh *Global Financial Integrity* (GFI), pada tahun 2015 Indonesia masuk dalam tiga puluh besar negara di dunia yang memiliki nilai aliran uang ilegal atau *illicit financial flows* tertinggi, yakni sebesar \$9,6 miliar (*Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015*, 2019). Selain itu, menurut data yang dikeluarkan oleh *International Monetary Fund* (IMF), pada tahun 2016 Indonesia menempati peringkat ke-11 negara yang melakukan praktik *tax avoidance* terkait pajak perusahaan dengan nilai yang diperkirakan sebesar 6,48 miliar dollar AS.

Kasus yang menimpa PT Coca-Cola Indonesia dan PT Toyota Manufacturing Indonesia, menjadi bukti nyata mewakili sekian banyak kasus *tax avoidance* yang mungkin belum berhasil terungkap di Indonesia. Modus yang sering digunakan dalam *tax avoidance* adalah melakukan *transfer pricing*.

Negara merugi akibat kurangnya jumlah pajak yang dibayarkan karena praktik *tax avoidance*. Praktik *tax avoidance* membuat penerimaan negara terkait pajak tidak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menyentuh target yang telah dibuat, oleh sebab itu *tax avoidance* layak untuk diteliti lebih jauh. Pengukuran terhadap *tax avoidance* secara langsung sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate (Cash ETR)* sebagai alat ukur dari *tax avoidance*. Penggunaan alat ukur tersebut didasari pada penelitian sebelumnya oleh Putri (2014).

Penelitian ini juga akan membahas salah satu faktor pemicu *tax avoidance*, yakni *corporate governance*. Pemilihan *corporate governance* sebagai variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* dikarenakan pengambilan keputusan untuk melakukan praktik *tax avoidance* merupakan kewenangan dari struktur *corporate governance* dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan penelitian terkait, “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Sektor-sektor yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2017).”

II. Tinjauan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai rujukannya, untuk menjelaskan hubungan antara *corporate governance* dengan *tax avoidance*. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan, sebagai suatu kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) untuk meminta orang lain (*agent*) melakukan pekerjaan sesuai dengan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepentingan *principal*, dan bertindak atas nama *principal* (*principal* melakukan pendelegasian wewenang kepada *agent* terkait pengambilan keputusan). Kedua belah pihak ini meskipun saling bekerja sama, masing–masing tetap mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, dan selalu berusaha agar kepentingan tersebut tetap dapat terlaksana. Perbedaan kepentingan inilah yang membuat masalah keagenan seperti *moral hazard* terjadi. Hal yang mendasar pada teori keagenan, jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah adanya benturan kepentingan antara manajemen perusahaan (*agent*) yang mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan laba, dengan pemegang saham (*principal*) yang mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kemakmurannya.

2.1.2. Tax Avoidance

Praktik *tax avoidance* adalah tindakan yang dibuat oleh wajib pajak guna untuk memperkecil pembayaran pajaknya, dengan cara menekan total kas yang harus dikeluarkan terkait pajak (Dewi & Sari, 2015). Slamet (2007) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu rancangan *transaction*, yang didesain guna menekan beban pajak melalui pemanfaatan kelemahan aturan perpajakan suatu negara. Berlandaskan definisi-definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *tax avoidance* ialah bentuk tindakan manajemen pajak oleh perusahaan, guna menekan kas yang harus dibayar terkait pajak kepada negara, dengan cara memanfaatkan kelemahan–kelemahan atau celah–celah (*tax loopholes*) yang ada di dalam aturan perpajakan. Cara–cara tersebut, diyakini tidak keluar dari kaidah peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.1.3. Corporate Governance

Definisi *corporate governance* yang dikutip dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* dari *Cadbury Committee* (2001), adalah seperangkat ketentuan yang menjadi pengatur relasi antara para pemegang saham, kreditur, manajer, karyawan, pemerintah dan *stakeholder* lainnya baik *stakeholder* internal maupun eksternal, yang juga berelasi dengan segala macam hak dan tanggung jawab mereka ataupun sistem, yang mana oleh *corporate governance*, perusahaan nantinya akan dikontrol dan diarahkan. Tujuan dari penerapan *corporate governance* pada perusahaan seharusnya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingannya. Praktik *tax avoidance* menciptakan kesempatan untuk manajer agar dapat bersikap oportunistis, demi tercapainya *goals* jangka pendek, yang mana berpotensi mampu menyebabkan *shareholder* merugi dalam jangka panjang (Minnick & Noga, 2010) dalam Sandy & Lukviarman (2015). Penelitian ini mengambil proksi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit untuk mengukur *corporate governance*.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Bersendikan teori keagenan, komisaris independen mendapat peran untuk melakukan pengawasan atas perilaku eksekutif lainnya (Solomon, 2007). Jika proporsi komisaris independennya kecil, maka peran komisaris independen dalam pengawasan juga tidak akan berjalan baik, sehingga eksekutif lainnya akan semakin leluasa untuk bertindak oportunistis (Solomon, 2007), yang pada akhirnya membuat para *shareholder* dirugikan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sebaliknya, *shareholder* tidak akan merugi malah kekayaannya akan semakin meningkat apabila proporsi komisaris independennya besar (Minnick & Noga, 2010).

Beberapa penelitian terdahulu seperti Wijayanti & Merkusiwati (2017), Ariawan & Setiawan (2017), Maharani & Suardana (2014), Santoso & Muid (2014), dan Diantari & Ulupui (2016) membuktikan bahwa, komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₁: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.2.2. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Teori keagenan menyebutkan bahwa, dapat terjadi keadaan ketika pihak yang satu lebih banyak memiliki informasi dibandingkan pihak lainnya, sehingga menimbulkan kondisi asimetri informasi. Hal tersebut juga terjadi dalam praktik *tax avoidance*. Agen yang dalam hal ini adalah manajemen perusahaan, mempunyai informasi yang lebih kaya daripada yang diketahui oleh *principal* (komite audit). Adanya asimetri informasi tersebut, membuat komite audit harus lebih cermat dalam menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan.

Penelaahan yang cermat tentu akan membutuhkan frekuensi rapat komite audit yang tinggi. Oleh karena itu, komite audit di setiap perusahaan disarankan untuk melakukan rapat dengan frekuensi lebih dari yang diwajibkan oleh peraturan OJK, agar mampu lebih cermat menelaah laporan dan informasi keuangan, sehingga pada akhirnya praktik *tax avoidance* dapat diketahui dan diminimalkan. Praktik *tax avoidance* tersebut, sebenarnya dilakukan untuk memenuhi kepentingan tertentu

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

manajemen perusahaan (agen), yang tentunya berseberangan dengan kepentingan komite audit (prinsipal) . Semakin sering komite audit bertemu, maka akan semakin efisien komite audit menjalankan tanggung jawabnya (Arinta, 2018). Penjelasan di atas sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Arinta (2018) dan Maharani (2015), yang membuktikan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
H₂: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.2.3. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Menurut teori keagenan, *principal* akan mengeluarkan biaya keagenan untuk mengatasi benturan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menggolongkan *agency cost* tersebut dalam tiga jenis, yang salah satunya adalah *monitoring cost*. *Fee* audit yang dibayarkan kepada KAP, merupakan contoh dari *monitoring cost*. Prinsipal mengeluarkan *fee* audit agar dapat menekan asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Selain untuk menekan asimetri informasi, prinsipal juga ingin mendapatkan kualitas audit yang bagus. Kualitas audit itu sendiri biasanya diukur dari ukuran suatu KAP. KAP yang masuk *Big Four*, lebih dipercayai oleh *principal* terkait opini yang diberikan atas laporan keuangan yang diperiksa, daripada KAP yang bukan *Big Four*. Penunjukkan KAP *Big Four*, diharapkan dapat menimbulkan *audit quality* yang bagus, dan menekan asimetri informasi sehingga terdapat transparansi dalam pertukaran informasi antara prinsipal dan agen.

Kualitas audit yang baik juga dapat mencerminkan suatu transparansi. Semakin besar ukuran KAP yang mengaudit, maka kualitas audit yang bagus juga akan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terpenuhi. Oleh karena itu, ukuran KAP dijadikan peneliti, untuk melakukan pengukuran terkait kualitas audit. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (*Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young*), memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* (Annisa & Kurniasih, 2012).

H₃: Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

III. Metodologi Penelitian

3.1. Sampel dan Data Penelitian

Sampel yang diteliti berasal dari populasi beberapa perusahaan di semua sektor yang terdaftar di BEI periode 2015–2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik ini dipilih peneliti, karena diyakini mampu memudahkan peneliti terkait kelengkapan data, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun beberapa kriteria untuk mendapatkan sampel penelitian ini tersaji sebagai berikut:

1. Perusahaan mulai terdaftar di BEI tahun 2015 dan tahun sebelumnya;
2. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2015–2017;
3. Perusahaan yang saat periode amatan 2015–2017 tidak mengalami *delisting*;
4. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dengan tanggal tutup buku 31 Desember selama periode penelitian 2015-2017;
5. Perusahaan mempublikasikan *annual report* dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berturut-turut selama periode penelitian 2015-2017;

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Perusahaan yang memiliki *Cash Effective Tax Ratio* atau CETR < 1
7. Perusahaan menampilkan data yang lengkap terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini selama periode penelitian 2015-2017;
8. Perusahaan tidak melakukan pembukuan dalam mata uang selain rupiah selama periode penelitian 2015-2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan tahun 2015-2017, yang telah dipublikasikan secara lengkap oleh BEI di www.idx.co.id serta di *website* masing – masing perusahaan.

3.2. Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Endogen Terikat

Penelitian ini menggunakan *Cash ETR* sebagai variabel endogen terikat.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Eksogen

Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Komisaris Independen (X_1)

Komisaris independen ialah bagian dari dewan komisaris yang dipilih dari luar perusahaan. Variabel tersebut dapat diukur melalui presentase jumlah komisaris independen, terhadap total anggota dewan komisaris (Maraya & Yendrawati, 2016).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

$$\text{INDP} = \frac{\text{JKI}}{\text{JSK}}$$

Keterangan:

INDP= Proporsi Komisaris Independen

JKI = Jumlah Komisaris Independen

JSK = Jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris

2. Komite Audit (X_2)

Komite audit diukur dengan melihat frekuensi pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit selama satu tahun dalam laporan tahunan perusahaan (Ariyani & Harto, 2014).

3. Kualitas Audit (X_3)

Berdasarkan ukurannya, KAP dibagi menjadi dua kelompok, yakni KAP yang tergolong *Big Four* dan KAP yang tergolong *non-Big Four*. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur lewat skala nominal yakni variabel *dummy*. Angka 1 (satu) merepresentasikan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan angka 0 merepresentasikan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non-Big Four* (Annisa & Kurniasih, 2012).

Variabel Kontrol

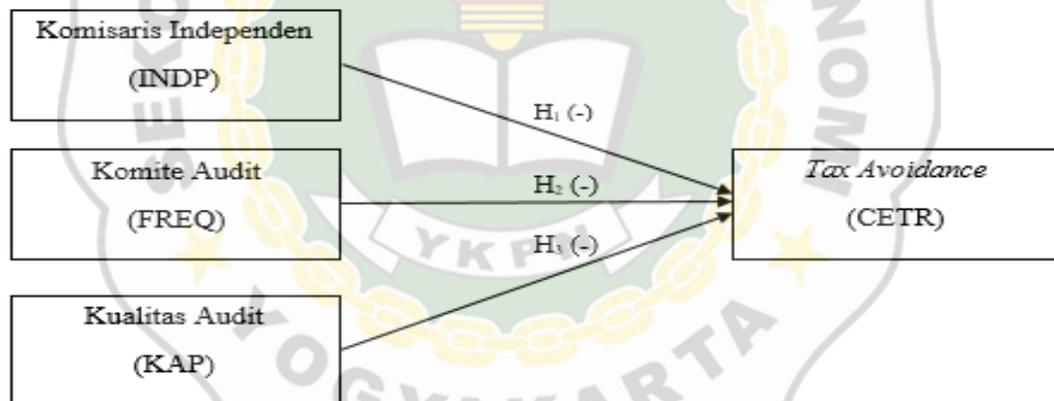
Variabel kontrol ialah variabel yang oleh peneliti, variabel tersebut akan dikendalikan dan memiliki sifat yang tetap, sehingga tidak ada pengaruh dari faktor lain yang dapat mempengaruhi relasi antara variabel independen atau eksogen dengan variabel dependen atau endogen terikat (Sugiyono, 2014). *Firm size* pada penelitian ini, akan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dipergunakan sebagai variabel kontrol. Skala yang menunjukkan kecil besarnya suatu perusahaan, bisa diketahui dari nilai ekuitas, *sales*, total pegawai, dan nilai keseluruhan aset serta yang lainnya (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Logaritma natural total aktiva perusahaan, digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan (Hartono, 2015).

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{total aktiva})$$

3.3. Model Penelitian



3.4. Metode dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM), sedangkan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data ialah *software Partial Least Square* (PLS). Dalam penelitian ini, alat pengujian statistik yang digunakan adalah program aplikasi komputer bernama WarpPLS versi 6.0. Aplikasi ini dapat menampilkan nilai signifikansi secara langsung, sehingga mempermudah peneliti untuk mengetahui hasil secara langsung. Selain itu, WarpPLS juga akan memberi peringatan apabila terjadi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

multikolinearitas yang cukup tinggi serta tersedianya output pengaruh tidak langsung/pemediasi (Sholihin & Ratmono, 2013).

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 41% dari total perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017, yang mana jumlah tersebut telah mewakili setiap sektor industri yang ada di Indonesia. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel yang mensyaratkan kriteria tertentu.

Tabel 4.1. menunjukkan hasil dari pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.1.
Hasil Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Sampel perusahaan yang terdaftar di BEI 2015-2017 yang digunakan	263
2	Perusahaan yang listing sesudah tahun 2015	(44)
3	Perusahaan yang tidak lengkap menampilkan informasi terkait data yang dibutuhkan	(91)
4	Perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah	(24)
5	Perusahaan yang <i>Cash ETR</i> > 1	(12)
6	Perusahaan yang tutup buku selain 31 Desember	(1)
7	Perusahaan yang dioutlier	(17)
	Total perusahaan yang menjadi sampel	74
	Total data amatan (74 x 3 tahun amatan)	222

Sumber: Pengolahan Data

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INDP	222	,25	,67	,4281	,10840
FREQ	222	2	21	6,95	4,056
KAP	222	0	1	,45	,498
CETR	222	-,13	,82	,2171	,18815
Valid N (listwise)	222				

Sumber: *Output SPSS*

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 222 sampel. Variabel komisararis independen memiliki nilai minimum 0,25 dan nilai maksimum 0,67 serta nilai rata-rata sebesar 0,4281. Variabel komite audit memiliki nilai srata-rata sebesar 6,95 dan nilai minimum serta maksimumnya adalah 2 dan 21. Nilai minimum dan maksimum untuk variabel kualitas audit adalah 0 dan 1, sedangkan nilai rata-ratanya adalah 0,45. Nilai rata-rata yang dimiliki variabel *tax avoidance* adalah sebesar 0,2171 sedangkan nilai minimum dan maksimumnya adalah -0,13 dan 0,82.

4.3. Analisis Partial Least Square

Analisis ini digunakan untuk menghitung nilai *goodmess of fit model*, yang dihitung dengan melihat data dari nilai *Q-square predictive relevance*. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai *Q-square predictive relevance* dan *Average R-Square*, untuk melihat kesesuaian model, *Average Path Coefficient* (APC) untuk melihat besarnya hubungan keterikatan antar variabel, dan *Average Variance Inflation Factor* (AVIF)

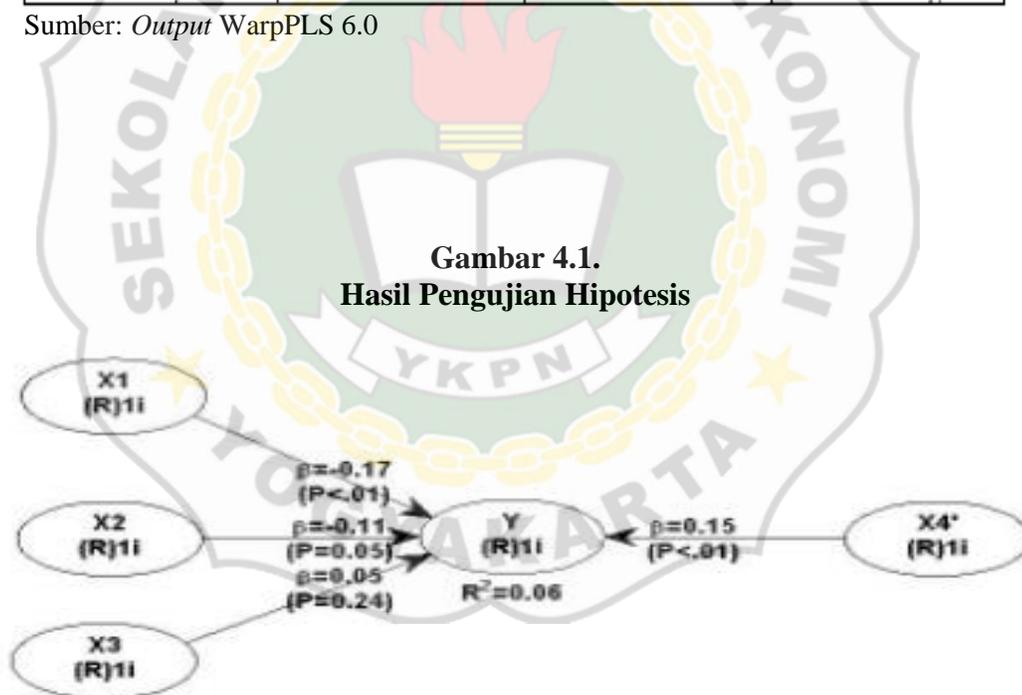
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk melihat besarnya multikolinearitas. Nilai model *fit* dalam PLS yang dihitung dengan melihat nilai *Q-square predictive relevance* adalah 0,0036.

Tabel 4.3.
Nilai Goodness of Fit Model

Hasil	<i>P-Value</i>	Kriteria	Keterangan
APC=0,121	P=0,017	<i>Good If</i> P<0,05	Didukung
ARS=0,063	P=0,087	<i>Good If</i> P<0,05	Tidak Didukung
AVIF=1,061		P<5	Didukung

Sumber: *Output WarpPLS 6.0*



Tabel 4.4.
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

Hipotesis	Prediksi	Variabel	Koef. Jalur	<i>P</i> - <i>value</i>	Signifikansi	Hasil
H1	-	INDP-CETR	-0,170	< 0,01	Signifikan	Didukung
H2	-	FREQ-CETR	-0,112	= 0,05	Signifikan	Didukung
H3	-	KAP-CETR	0,046	0,244	Tidak Signifikan	Tidak Didukung

4.4. Pembahasan Hipotesis

4.4.1. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Mengacu pada pengujian hipotesis pertama, diketahui bahwa *P-value* yang didapat (< 0,01) lebih kecil dari nilai α yang digunakan ($\leq 0,05$), dan koefisien jalur yang didapat mempunyai tanda negatif -0,170. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen terbukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hasil pengujian mendukung hipotesis yang pertama ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016), Ariawan dan Setiawan (2017), Wijayanti dan Merkusiwati (2017), dan Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori keagenan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menyatakan bahwa apabila jumlah komisaris independen semakin bertambah pada struktur dewan komisaris, maka fungsi pengawasan terkait tindakan eksekutif perusahaan akan semakin baik pula. Premis dari teori keagenan, yaitu perilaku oportunistik eksekutif perusahaan dapat diawasi dan dikontrol dengan baik oleh komisaris independen, terutama terkait penghindaran pajak.

4.4.2. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, diketahui bahwa *P-value* yang didapat ($= 0,05$) sama dengan tingkat signifikansi (nilai α) yang digunakan ($\leq 0,05$), dan koefien jalur yang didapat mempunyai tanda negatif $-0,112$. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit terbukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hasil pengujian mendukung hipotesis yang kedua ini.

Output penelitian ini berseberangan dengan *output* penelitian oleh Arinta (2018) dan Maharani (2015), yang menerangkan bahwa komite audit yang diukur oleh frekuensi rapat komite audit, berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Komite audit oleh OJK diwajibkan untuk mengadakan rapat minimal sekali dalam tiga bulan. Apabila frekuensi rapat komite audit semakin tinggi, maka semakin banyak waktu yang digunakan untuk menelaah laporan dan informasi keuangan secara lebih cermat, serta juga dapat membahas hal-hal atau kebijakan apa saja yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diperlukan dalam rangka meminimalkan penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan.

4.4.3. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, diketahui bahwa *P-value* yang didapat ($= 0,244$) lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan ($\leq 0,05$), dan koefien jalur yang didapat mempunyai tanda positif $0,046$. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hasil pengujian tidak mendukung hipotesis yang ketiga ini.

Output penelitian ini senada dengan *output* penelitian terdahulu oleh Vidiyanti (2017), yang menyatakan bahwa kualitas audit dengan membedakan KAP *Big Four* dan KAP *Non-Big Four* menggunakan skala *dummy*, ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tidak adanya pengaruh antara kualitas audit dengan *tax avoidance*, disebabkan tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang telah diaudit oleh KAP *Big Four* dengan KAP *Non-Big Four*, dalam menjalankan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Penyebabnya hal tersebut adalah KAP *Big Four* maupun *Non-Big Four* saat mengaudit laporan keuangan perusahaan, masing-masing mempunyai reputasi yang baik yang didasarkan pada standar pengendalian mutu kualitas audit, yang telah dibuat oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI), dan juga didasarkan pada aturan yang telah dibuat oleh Ikatan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga dalam pelaksanaan audit itu sendiri dapat dipastikan telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

V. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen dan komite audit terbukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu penggunaan semua sektor industri sebagai objek penelitian yang mengakibatkan peneliti tidak dapat memberikan kesimpulan yang *general*, dalam menggambarkan pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*, karena setiap sektor mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, tahun amatan dalam penelitian ini tidak sampai tahun dikeluarkannya laporan yang terbaru (2018), hal ini dikarenakan pada saat penelitian, masih banyak perusahaan yang belum mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangannya untuk tahun 2018. Dengan adanya keterbatasan tersebut diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel apabila ingin meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di semua sektor industri, agar data dapat menggambarkan model yang dibuat serta menggunakan variabel mediasi tertentu seperti karakteristik perusahaan untuk melihat ada tidaknya pengaruh tidak langsung antara *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daftar Pustaka:

- Amelia, M. V., Pratomo, D., & Kurnia. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. Bandung: Universitas Telkom.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*.
- Ariawan, I., & Setiawan, P. E. (2017, Maret). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 1857.
- Arinta, Y. N. (2018, Desember). Pengaruh Corporate Governance Islam Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(2), 84.
- Ariyani, N. F., & Harto, P. (2014). Pengaruh Mekanisme Pengawasan Stakeholder Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*.
- Dewi, G., & Sari, M. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 51.
- Dewi, K., & Jati, I. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016, Juli). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 730.
- Dyreg, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83.
- Friana, H. (2019, Januari 2). *Realisasi Pendapatan Negara 100,2 Persen Dari Target Pada 2018*. (A. M. Idhom, Editor) Retrieved Maret 27, 2019, From Tirto: <https://tirto.id>
- Hartono, J. (2015). *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Illicit Financial Flows To And From 148 Developing Countries: 2006-2015*. (2019, Januari 28). Retrieved Maret 23, 2019, From Global Financial Integrity: <https://www.gfintegrity.org>
- Irawan, H., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi Xv*. Banjarmasin.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, And Ownership Structure. *Journal Of Financial And Economics*, 305-360.
- Maharani, D. P. (2015). Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Yang Tercatat Di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Skripsi*, 37.
- Maharani, I., & Suardana, K. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016, Desember). Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Dan Cpo. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 152.
- Mayangsari, S. (2003). Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, Serta Mekanisme Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi Vi*.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management ? *Journal Of Corporate Finance*.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*.
- Natawidnyana. (2008, Oktober 28). *International Financial Reporting Standards (Ifrs): A Brief Description*. Retrieved From Natawidnyana's Weblog: <https://natawidnyana.wordpress.com>
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014, September). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, Xviii(3).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. (2006). Retrieved Maret 27, 2019, From Komite Nasional Kebijakan Governance (Knkg): [Http://Www.Knkg-Indonesia.Org/](http://www.knkg-indonesia.org/)
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Simposiumnasional Akuntansi Xvii*. Mataram.
- Putri, A., & Musvianti, M. (2018). Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*.
- Putri, L. (2014). Pengaruh Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2008-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2. *Rasio Pajak (Tax Ratio) Dari Masa Ke Masa*. (2018, September 10). Retrieved From Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan: [Http://Www.Pajak.Go.Id](http://www.pajak.go.id)
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015, Desember). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jaai*, 19(2).
- Santoso, T., & Muid, D. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(4).
- Sartori, N. (2010). *Effect Of Strategic Tax Behaviours On Corporate Governance*. Retrieved Maret 27, 2019, From [Https://Www.Ssrn.Com](https://www.ssrn.com)
- Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)* (3 Ed.). (2001). Jakarta: Forum For Corporate Governance In Indonesia (Fcgi).
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Sem-Pls Dengan Wrap-Pls 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Slamet, I. (2007, September). Tax Planning, Tax Avoidance, Dan Tax Evasion Di Mata Perpajakan Indonesia. *Inside Tax*, 8.
- Solomon, M. (2007). *Consumer Behavior, Buying, Having, And Being*. New Jersey: Prentice Hall.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Susanti, P. B. (2011). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta).
- Tarigan, M. U., & Susanti, P. B. (2013, April). Pengaruh Kompetensi, Etika, Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, 13(1).
- Ujiyantho, M., & Pramuka, B. A. (2007). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Go Public Sektor Manufaktur). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Vidiyanti, E. (2017). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Return On Assets, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Journal Of Economics, Business & Accountancy Ventura*.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. (2017, Juli). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20, 725.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax And Accounting Review*, 4.